

## KERTAS DATA AUDIT

Unit Kerja : fmipa  
Sasaran : Pengelolaan Keuangan  
Masa Audit : Januari 2019  
Bulan Audit : Februari 2019  
Auditor : auditor\$

Kode Temuan 1.04 : Ketidapatuhan terhadap Peraturan : administrasi

Deskripsi Masalah : Pertanggungjawaban pembayaran/ pembelian barang/jasa tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)

### Uraian

#### a. Kondisi:

- Hasil audit dokumen SPJ diketahui bahwa pengelolaan administrasi keuangan bulan Februari tahun 2019 di Unit Kerja : fmipa belum sepenuhnya tertib, antara lain:

#### 1. Kelengkapan berkas SPJ

No	Kelengkapan	Keterangan		
		Ada / Tidak ada	Jumlah	Nominal
1	Rekap Per Mak	Ada	3	Rp. 340000
2	Rekap SPJ (urut)	Ada	4	Rp. 450000
3	Kwitansi di Rekap SPJ	Ada	5	Rp. 88000
4	Fisik kwitansi yang ada	Tidak Ada		Rp.
5	Kwitansi yang ada temuan	Tidak Ada		Rp.
6	BA Serah Terima UMK	Tidak Ada		Rp.
7	BA Rekonsiliasi	Tidak Ada		Rp.
8	Transaksi Jurnal	Tidak Ada		Rp.
9	Bukti Setor Saldo	Tidak Ada		Rp.

#### 2. Ketidapatuhan terhadap aturan yang berlaku

Kwitansi	nominal	keterangan
123	45000	terlalu terang
321	43000	terlalu gelap
231	34000	kok samar samar

- Hasil audit dokumen SPJ diketahui bahwa pengelolaan administrasi keuangan tahun 2019 yang dilaksanakan BPP di Unit Kerja : fmipa yang belum ditindaklanjuti, antara lain:

#### **b. Kriteria**

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2013 tanggal 7 juni 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, Pasal 65 ayat (1): "**Penyelesaian tagihan kepada negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh bayaran**".
2. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2018 tentang **Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 6 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember**.
3. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 6 tahun 2018 tentang **Standar Biaya Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun Anggaran 2018**.

#### **c. Kesimpulan**

Pengelolaan administrasi di Unit Kerja : fmipa belum tertib karena kurangnya pengendalian internal pimpinan Unit Kerja, kekurangcermatan dan belum optimal BPP dalam melaksanakan tanggungjawabnya dan lemahnya pengawasan PPK terkait, sehingga menyebabkan tertib administrasi keuangan tidak tercapai.

#### **d. Rekomendasi**

Pimpinan Unit Kerja menginstruksikan BPP terkait untuk segera melengkapi bukti pertanggungjawaban pembayaran/pembelian barang/jasa sesuai peraturan yang berlaku.

#### **e. Tanggapan**

(Bisa disampaikan dalam kertas terpisah dan ditandatangani oleh pimpinan Unit Kerja Terkait)

Surabaya, 15 Februari 2019

Ka Unit Audit internal Bidang Keuangan,

Menyetujui

Auditan,

Ir. Tony Bambang M.,PGDip

.....